

ABSTRAK

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Namun, kedudukan badan ini sebagai lembaga pemerintah non kementerian masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat perihal kedudukannya yang terjadi *overlapping* dengan lembaga kelautan lainnya. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai kedudukan badan tersebut sebagai lembaga pemerintah non kementerian, termasuk peran dan kewenangan yang dimilikinya di bidang keamanan laut serta hambatannya. Diharapkan dengan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai badan tersebut.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penulisan hukum ini adalah *juridis normatif*. Dalam menggunakan metode *juridis normatif* ini dilakukan dengan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Secara garis besar pendekatan perundang-undangan ini menggunakan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual merujuk pada doktrin dan teori-teori hukum yang disampaikan oleh para ahli terkait. Pendekatan sejarah menelaah dan menelusuri sejarah dari permasalahan yang diteliti..

Penelitian yang diperoleh bahwa Bakamla adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dalam melakukan penegakan hukum di laut. Badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Badan ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut dan memastikan kegiatan di laut berlangsung dengan teratur dan sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, badan tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas keamanan laut di Indonesia. Kendala ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya kewenangan, permasalahan keuangan, dan ancaman kejahatan laut internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antarinstansi dan upaya pengembangan sumber daya manusia dan teknologi yang lebih baik serta pengembangan kewenangan dan kebijakan untuk menjaga keamanan laut Indonesia.

Kata Kunci: Kedudukan; Badan Keamanan Laut (Bakamla); Lembaga Pemerintah Non Kementerian

ABSTRACT

The Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla) is a non-ministerial government institution that plays an important role in maintaining maritime security in Indonesia. However, the agency's position as a non-ministerial government institution is still a subject of debate among the public due to overlapping responsibilities with other maritime institutions. This legal writing will discuss the agency's position as a non-ministerial government institution, including its role and authority in the field of maritime security, as well as its challenges. The aim is to provide a clearer picture of the agency.

The approach used in this legal writing is a normative juridical approach. This approach involves three methods, namely legislative approach, conceptual approach, and historical approach. The legislative approach uses legal materials related to the issue being researched. The conceptual approach refers to legal doctrines and theories presented by relevant experts. The historical approach examines and traces the history of the issue being researched.

Research has shown that Bakamla is a state institution that has direct responsibilities to the President in enforcing the law at sea. The agency is regulated in Law Number 32 Year 2014 concerning Maritime Affairs and Presidential Regulation Number 178 Year 2014 concerning Bakamla. The agency plays a significant role in maintaining maritime security and ensuring that activities at sea are conducted in an orderly and lawful manner. However, the agency still faces many challenges in carrying out its duties and functions as a supervisor of maritime security in Indonesia. These challenges include limited human and technological resources, lack of coordination between agencies, weak authority, financial problems, and threats of international maritime crimes. Therefore, interagency cooperation, better development of human and technological resources, and the development of authority and policies are needed to maintain maritime security in Indonesia.

Keywords: Position; The Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla); Non-Ministerial Government Institution